



# JURNAL RISET AKUNTANSI

Volume VIII/No.1/April 2016

ISSN: 2086-0447

PENGENDALIAN SISTEM MATERIAL HANDLING PADA INDUSTRI MANUFAKTUR MODERN

**Ning W.**

PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT

**Ony Widilestariningtyas  
Ginangjar**

PENGARUH EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA TELKOM FOUNDATION

**Fitroh Nurani  
Evi Octavia**

ANALISIS *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) PENGARUHNYA TERHADAP KREDIT YANG DIBERIKAN (STUDI KASUS PADA PT. BANK PERMATA TBK. YANG TERDAFTAR DI BEI)

**Wati Aris Astuti  
Noneng**

ANALISIS TERHADAP SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BANDUNG TAHUN 2009-2013

**Adeh Ratna Komala  
Dewi Eka Apriliyani S.**

POLA KEMITRAAN DAN PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEKTOR AGRIBISNIS

**Sri Dewi Anggadini**



PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI

**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

JL.Dipatiukur 112-114 Bandung 40132 Telp.022-2504119, Fax. 022-2533754

Email : [akuntansi@email.unikom.ac.id](mailto:akuntansi@email.unikom.ac.id)

**SUSUNAN TIM  
JURNAL RISET AKUNTANSI**

**PELINDUNG**  
REKTOR UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

**PENASEHAT**  
PEMBANTU REKTOR UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

**PEMBINA**  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

**KETUA TIM REDAKSI**  
Dr. Siti Kurnia Rahayu, SE., M.Ak., Ak., CA..

**PENYUNTING AHLI**  
**Ketua:**  
Prof. Dr. Dwi Kartini., SE., Spec., Lic

**Anggota:**

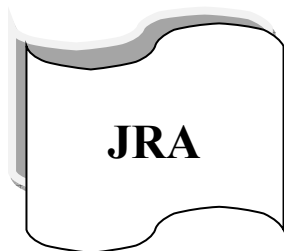
Prof. Dr. Hj. Ria Ratna Ariawati, SE.MS., Ak	(Universitas Komputer Indonesia Bandung)
Prof. Dr. Soekrisno Agoes, Drs., Ak	(Universitas Tarumanagara Jakarta)
Dr. H. Deddy Supardi, SE., M.Si., Ak	(Universitas Sangga Buana Bandung)

**TIM EDITING**  
Sri Dewi anggadini, SE., M.Si., Ak.  
Adi Rachmanto, S.Kom., M.Kom.

**TATA USAHA**  
Sekretariat Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

**ALAMAT PENYUNTING DAN REDAKSI:**  
Program Studi Akuntansi  
Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 40132  
Tlp 022. 2504119, fax (022) 2533754  
e-mail: [akuntansi@email.unikom.ac.id](mailto:akuntansi@email.unikom.ac.id)





## KEBIJAKAN EDITORIAL

Jurnal Riset Akuntansi, diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia Bandung secara berkala (Setiap enam bulan sekali) dengan tujuan untuk menyebarkan informasi hasil riset akuntansi kepada para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan lain-lain meliputi bidang : Akuntansi, Bisnis, dan Manajemen.

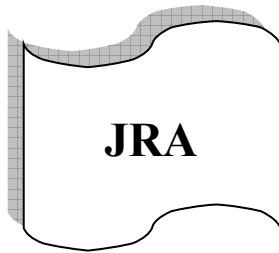
Jurnal riset akuntansi menerima kiriman artikel hasil riset akuntansi dan manajemen yang ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Penulis harus menyatakan bahwa artikel yang dikirim ke jurnal riset akuntansi tidak dikirimkan atau telah dipublikasi dalam jurnal yang lain. Untuk artikel hasil riset dengan pendekatan survey atau eksperimental, penulis harus melampirkan instrumen riset (Kuesioner, kasus, daftar wawancara, dan lain-lain). Agar hasil riset bisnis dan manajemen yang dimuat dalam jurnal riset akuntansi dapat bermanfaat untuk pengembangan praktik, pendidikan dan riset akuntansi, penulis artikel berkewajiban memberikan data riset kepada yang memerlukannya dan memberikan informasi cara memperoleh data tersebut.

Penentuan artikel yang dimuat dalam jurnal riset akuntansi melalui proses blind review oleh jurnal riset akuntansi, dengan mempertimbangkan antara lain : terpenuhinya persyaratan baku publikasi jurnal, metodologi riset yang digunakan, dan signifikansi kontribusi hasil riset terhadap pengembangan profesi dan pendidikan akuntansi dan manajemen. Editor bertanggung-jawab untuk memberikan telaah konstruktif, dan jika dipandang perlu, menyampaikan hasil evaluasi kepada penulis artikel. Artikel dikirim ke editor jurnal riset akuntansi dengan alamat :

### **Ketua Editor**

Prof. Dr. Dwi Kartini., SE.,Spec.,Lic  
Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kampus IV, Lantai 3  
Jl. DipatiUkur No. 112-114 Bandung 40132  
Telp. (022) 2504119, Fax. (022) 2533754  
Email : akuntansi@email.unikom.ac.id





## PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

Berikut Ini adalah pedoman penulisan artikel dalam Jurnal Riset Akuntansi yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penulis.

1. Sistematika pembahasan dalam artikel setidaknya terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut :
  - Abstrak** bagian ini memuat ringkasan riset, antara lain mengenai : masalah riset, tujuan, metode, temuan, dan kontribusi hasil riset. Abstrak disajikan di awal teks dan terdiri antara 150 s/d 200 kata (sebaiknya disajikan dalam bahasa inggris). Abstrak diikuti dengan tiga kata kunci (*keywords*) untuk memudahkan penyusunan indeks artikel.
  - I. **Pendahuluan** menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian.
  - II. **Kajian pustaka**, kerangka pemikiran dan hipotesis memaparkan kajian pustaka berdasarkan telaah literature yang menjadi landasan logis untuk mengembangkan kerangka pemikiran dan hipotesis atau proposisi riset dan model riset (jika dipandang perlu).
  - III. **Objek dan metode penelitian** memuat objek penelitian menguraikan objek yang diteliti sesuai dengan judul riset dan metode penelitian yang berisi desain penelitian, operasionalisasi variable, teknik pengumpulan data, unit analisis, teknik penarikan sampel, pengujian hipotesis.
  - IV. **Hasil penelitian dan pembahasan** menguraikan hasil penelitian memuat hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan memuat analisis statistik (jika ada) dan analisis ekonomi.
  - V. **Kesimpulan dan saran** menguraikan kesimpulan penelitian dan saran berisi solusi dan kelemahan penelitian, temuan dan keterbatasan penelitian.
  - VI. **Daftar pustaka** memuat sumber-sumber yang dikutip di dalam penulisan artikel. Hanya sumber yang diacu yang dimuat di daftar referensi ini.

Lampiran memuat table, gambar, dan instrumen riset yang digunakan.

2. Artikel diketik dengan jarak baris satu spasi pada kertas A4 (21 cm x 29,7 cm). kutipan langsung yang panjang (lebih dari tiga baris) diketik dengan jarak baris satu dengan *indented style* (bentuk berinden).
3. Panjang artikel tidak lebih atas 7.000 kata (dengan Jenis huruf arial ukuran 10) atau maksimal 25 halaman.
4. Margin atas = 4 cm dan bawah, kiri dan kanan = 3 cm.
5. Halaman muka (cover) setidaknya menyebutkan judul artikel dan identitas penulis).
6. Semua halaman, termasuk table, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman.
7. Table/gambar sebaiknya dapat disajikan pada halaman terpisah dari badan tulisan (umumnya di bagian akhir naskah). Penulis cukup menyebutkan pada bagian di dalam teks, tempat pencantuman table atau gambar.

8. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul yang sesuai dengan isi tabel atau gambar dan sumber kutipan (bila relevan).
9. Kutipan dalam teks sebaiknya ditulis di antara kurung buka dan kurung tutup yang menyebutkan nama akhir penulis, tahun, koma, dan nomor halaman jika dipandang perlu.  
Contoh :
  - a. Satu sumber kutipan dengan satu penulis (Brownell 1981). Jika disertai nomor halaman : (Brownell 1981).
  - b. Satu sumber kutipan dengan dua penulis (Frucot dan Shearon 1991).
  - c. Satu sumber kutipan dengan lebih dari dua penulis (Gul dkk. 1995 atau Hotstede et al. 1990).
  - d. Dua sumber kutipan dengan penulis yang berbeda (Dunk 1990; Mia 1988).
  - e. Dua sumber kutipan dengan penulis yang sama (Brownell 1981, 1983) Jika tahun publikasi sama (Brownell 1982a, 1982b).
  - f. Sumber kutipan yang berasal dari pekerjaan suatu institusi sebaiknya menyebutkan akronim institusi yang bersangkutan misalnya (IAI, 1994).
10. Setiap artikel harus memuat daftar pustaka (hanya yang menjadi sumber kutipan) dengan ketentuan penulisan sebagai berikut ;
  - a. Daftar pustaka disusun alfabetis sesuai dengan nama penulis atau nama institusi.
  - b. Susunan setiap referensi ; nama penulis, tahun publikasi, judul jurnal atau buku teks, nama jurnal atau penerbit, nomor halaman.
  - c. Contoh :

American Accounting Association, Committee on Concepts and Standards for External Financial Reports. 1997. Statement on Accounting Theory and Theory Acceptance/ Sarasota, FL : AAA.

Demski, J.S., dan D.E.M. Sappington. 1989. Hierarchical Structure and Responsibility Accounting, *Journal of Accounting Research* 27 (Spring) ; 40-58.

Dye, R.; B. Balachandran; dan R. Magee. 1989. Contigent Fees for Audit Firm. Working paper, Northwestern University, Evansto, Il.

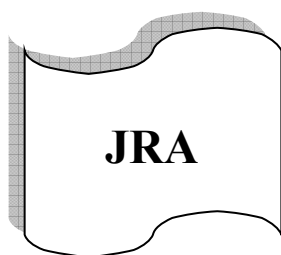
Indriantoro, N. 1993. The Effect of Participative Budgeting on Job Performance and Job Satisfaction with Locus of Control and Cultural Dimensions as Moderating Variables.Ph.D. dissertation. University of Kentucky, Lexington.

Naim, A. 1997. Analysis of The Use of Accounting Product Costs In Oligopolistic Pricing Decisions. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 12 (Oktober) 43-50.

Porcano, T.M. 1984a. Distructive Justice and Tax Policy. *The Accounting Review*, 59 (October) : 619-636.

\_\_\_\_\_, 1984b. The Perceived Effects of Tax Policy on Corporate Investment Intentions. *The Journal of the American Taxation Association* 6 (Fall) : 7-19.

Pyndyk, R.S. dan D.L. Rubinfeld. 1987. *Econometric Models & Economic Forecast*, 3<sup>rd</sup> ed., NY : McGraw-Hill Publishing, Inc.
11. Artikel diserahkan dalam bentuk cd dan empat eksemplar cetakan.



## DAFTAR ISI

Keterangan	Halaman
Editorial Staff Jurnal Riset Akuntansi	i
Kebijakan Editorial	iii
Pedoman Penulisan Artikel	v
Daftar isi	vii
1. <b>PENGENDALIAN SISTEM MATERIAL HANDLING PADA INDUSTRI MANUFAKTUR MODERN</b> Ning W.	1
2. <b>PENGARUH MANAJEMEN ASET TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA BARAT</b> Ony Widilestariningtyas Ginjar	8
3. <b>PENGARUH EFEKTIFITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA TELKOM FOUNDATION</b> Fitroh Nurani Evi Octavia	19
4. <b>ANALISIS CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) PENGARUHNYA TERHADAP KREDIT YANG DIBERIKAN (STUDI KASUS PADA PT. BANK PERMATA TBK. YANG TERDAFTAR DI BEI)</b> Wati Aris Astuti Noneng	30
5. <b>ANALISIS TERHADAP SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BANDUNG TAHUN 2009-2013</b> Adeh Ratna Komala Dewi Eka Apriliyani S.	41
6. <b>POLA KEMITRAAN DAN PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SEKTOR AGRIBISNIS.</b> Sri Dewi Anggadini	54



## ANALISIS TERHADAP SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BANDUNG TAHUN 2009-2013

Adeh Ratna Komala

Dewi Eka Apriliyani S

### 1. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara paling utama yang digunakan untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Ni Ketut Muliari, 2011). Dikatakan lebih lanjut bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang terus meningkat dibandingkan dengan penerimaan dari sektor migas (Mardiasmo 2002:2). Pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri, sehingga target penerimaan dari pajak ini terus meningkat setiap tahun dan merupakan potensi yang cukup besar untuk bisa digali di Indonesia (Agusti dan Herawaty, 2009:2).

Penerimaan pajak memerlukan suatu perencanaan yang wajar dan objektif dalam arti tidak hanya berorientasi pada pencapaian penerimaan semata, akan tetapi juga harus melihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di dalam penentuan suatu target penerimaan pajak. Oleh karena itu perlu dikaji faktor-faktor manakah yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak sehingga target yang dialokasikannya dapat teralisasi dengan baik sesuai dengan potensi yang ada (Rahmad dkk, 2011).

Kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak selama ini belum optimal (Wiko Saputra, 2014). Hal senada dikatakan Fuad Rahmany (2014) yang mengatakan bahwa penerimaan pajak dari tahun 2010 mengalami penurunan hingga tahun 2014. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan Danhil Anzar (2014) yang menyebutkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia sulit ditingkatkan. Berikutnya Bambang PS Brodjonegoro (2014) menyebutkan bahwa salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah melalui ekstensifikasi diantaranya dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif (Maria, 2011). Yustinus (2015) menegaskan bahwa masih ada perusahaan sebagai wajib pajak terdaftar tidak aktif membayar pajak karena menganggap bukan kewajiban sehingga diabaikan. Hal tersebut juga dipertegas oleh penemuan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees, dimana jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar mengalami peningkatan tetapi pelaporan SPT mengalami penurunan setiap tahunnya.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui surat tagihan pajak. Mardiasmo (2009:37) mengatakan bahwa surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga atau denda, surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa, apabila pajak yang terutang berdasarkan dasar penagihan pajak tidak dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih dengan surat paksa.

Menurut Ilyas dan Burton (2008: 47) surat tagihan pajak (STP) terdiri dari surat ketetapan pajak (SKP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Lebih lanjut dikatakan bahwa surat tagihan pajak merupakan surat pertama yang dikeluarkan jika wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak akibat salah tulis atau salah hitung, harus membayar denda sebesar 2%, belum menjadi pengusaha kena pajak tetapi telah memungut pajak, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan tetapi tidak benar. Selanjutnya Ginting (2006) menyebutkan bahwa wajib pajak yang terutang pajak 95% mau membayar pajak setelah surat penagihan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “**Analisis terhadap Surat Tagihan Pajak dan Penerimaan Pajak**”.

## 2. Landasan Teori

### Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Erly Suandy, 2002:3).

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006, 151) Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak guna memenuhi kewajiban perpajakan.

Berikutnya definisi Surat Tagihan Pajak (STP) menurut Mardiasmo (2009:37 ) adalah sebagai berikut:

“Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga atau denda, surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa, apabila pajak yang terutang berdasarkan dasar penagihan pajak tidak dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih dengan surat paksa”.

Selanjutnya Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:173) menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Dari definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa surat tagihan pajak adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak berupa sanksi administratif seperti bunga atau denda, memiliki hukum dan dapat ditagih dengan menggunakan surat paksa apabila pajak yang terutang tidak dibayar oleh wajib pajak.

Fungsi STP menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 28 tahun 2007 adalah untuk menagih:

- 1) Pajak dalam tahun berjalan yang tidak atau kurang bayar
- 2) Kekurangan pembayaran atau penyetoran pajak akibat salah tulis dan atau hitung dalam SPT
- 3) Jika Wajib Pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT, maka sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- untuk SPT Masa dan denda sebesar Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan
- 4) Pasal 19 ayat (1) UU KUP, sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan untuk seluruh masa pajak atas jumlah pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT,

dan tambahan jumlah pajak berdasarkan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding pada saat jatuh tempo.

Adapun Penerbitan STP menurut pasal 14 (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- 1) Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar
- 2) Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan salah hitung
- 3) Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga
- 4) Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
- 5) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi telah membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

Berikutnya kewajiban wajib pajak penerima Surat Tagihan Pajak adalah:

- 1) Melunasi Surat Tagihan Pajak (STP) sebelum jatuh tempo.
- 2) Apabila pada saat jatuh tempo pembayaran, atas pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) atau kurang dibayar, maka wajib pajak juga dikenakan sanksi administrasi bunga penagihan dan wajib pajak harus melunasi.
- 3) Melaporkan pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) kepada seksi penerimaan dan seksi penagihan di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.

Adapun hak wajib pajak, seperti yang tercantum dalam pasal 16 (1) UU KUP yaitu, wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembetulan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dalam penerbitannya terdapat salah tulis, salah hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### Indikator Surat Tagihan Pajak

Indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel Surat Tagihan Pajak menggunakan skala Rasio dan menggunakan perhitungan data deret waktu (Awat, 1995:547) tiap tahun dari STP yang dikeluarkan oleh fiskus tiap tahunnya, dimana perhitungan dimulai dari tahun 2009 hingga tahun 2013 dengan rumus sebagai berikut :

Surat Tagihan Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$STP = \frac{STP \text{ Tahun ini} - STP \text{ Tahun lalu}}{STP \text{ Tahun lalu}} \times 100\%$$

(Sumber: Awat, 1995:547)

### Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut Jhon Hutagaol (2008, 325) adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Rifai Yusuf (2011) mengatakan bahwa

penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan yang paling penting dan dominan untuk baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang diperoleh secara terus menerus demi memenuhi kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

### Indikator Penerimaan Pajak

Adapun indikator yang penulis gunakan untuk mengukur variabel Penerimaan Pajak dengan menggunakan skala rasio. Penerimaan Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}}$$

(sumber : Jhon Hutagaol 2008, 325)

### 3. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dan metode Verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan metode deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencadangan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Sumadi,2013:76). Sedangkan metode verifikatif adalah memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupannya (Mashuri, 2008:45).

Menurut Sugiyono (2013:8) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka) dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, metode deskriptif dan verifikatif tersebut digunakan untuk menguji lebih dalam pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama kota Bandung, serta menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.

### Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel yaitu variabel Surat Tagihan Pajak (X) sebagai variabel bebas sedangkan variabel Penerimaan Pajak (Y) sebagai variabel dependen atau variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2013:39) :

- 1) Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent* yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

- 2) Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel *output*, kriteria, *konsekuen* yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan objek penelitian yaitu pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Bandung.

Peneliti menggunakan skala pengukuran guna menghasilkan data kuantitatif yang akurat dan tepat. Menurut Sugiyono (2013:92) skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.

Skala pengukuran rasio mempunyai semua karakteristik yang dimiliki oleh skala nominal, ordinal dan interval dengan keindahan skala ini mempunyai nilai 0 (nol) empiris absolut atau mempunyai titik awal nol yang berkaitan dengan ketidakhadiran variabel yang sedang diukur. Nilai absolut nol tersebut terjadi pada saat ketidakhadirannya suatu karakteristik yang sedang diukur. Pengukuran rasio biasanya dalam bentuk perbandingan antara satu individu atau obyek tertentu dengan lainnya (Jonathan, 2012:71).

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah, maka operasionalisasi variabel penelitian dapat disajikan dalam gambar tabel dibawah ini :

**Tabel 1.**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Konsep variabel	Indikator	Skala
<b>Surat Tagihan Pajak (X)</b> (Siti Kurnia Rahayu, 2010:186; Mardiasmo 2009:37 )	Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.  (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:173)	$\frac{STP \text{ Tahun ini} - STP \text{ Tahun lalu}}{STP \text{ Tahun lalu}} \times 100\%$  (Awat , 1995:547)	Rasio
<b>Penerimaan Pajak (Y)</b> (Jhon Hutagaol, 2008: 325; Rifai Yusuf, 2011)	Penerimaan Pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.  (Jhon Hutagaol, 2008:325)	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}}$  (Jhon Hutagaol, 2008:326)	Rasio

**Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2013:137) sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Penelitian ini menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain, yaitu informasi setiap tahun mengenai Jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah wajib lapor SPT, jumlah STP yang diterbitkan, jumlah realisasi penerimaan pajak dan jumlah target penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1) Studi kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menelaah *text book* dan website yang ada seperti [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

- a) Observasi: Pengamatan ini dilakukan dengan mendatangi langsung KPP Pratama Kota Bandung untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti terkait judul yang diteliti.
- b) Dokumentasi: Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

### Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1.

**Tabel 2.**

**Populasi**

**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1**

Kode	Nama KPP
441	KPP Madya Bandung
405	KPP Pratama Sukabumi
406	KPP Pratama Cianjur
409	KPP Pratama Purwakarta
421	KPP Pratama Cimahi
422	KPP Pratama Bandung Tegalega
423	KPP Pratama Bandung Cibeunying
424	KPP Pratama Bandung Karees
425	KPP Pratama Tasikmalaya
428	KPP Pratama Bandung Bojonagara
429	KPP Pratama Bandung Cicadas
442	KPP Pratama Ciamis
443	KPP Pratama Garut

Kode	Nama KPP
444	KPP Pratama Majalaya
445	KPP Pratama Soreang
446	KPP Pratama Sumedang

### Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini, penarikan sampel menggunakan teknik *Nonprobability Sampling*. *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap umur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2012:120).

Adapun kriteria yang digunakan untuk penentuan sampel, yaitu:  
KPP Pratama yang terdaftar di Kota Bandung.

**Tabel 3.**  
**Hasil Purposive Sampling**

Keterangan	Jumlah
KPP yang berada dikota Bandung	5
KPP di kota Bandung yang terpilih menjadi sampel	5

Menurut Sugiyono (2013, 116), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan kriteria yang dijelaskan di atas maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung ada 5 (Lima) KPP, adapun data yang digunakan penulis selama 5 tahun yaitu mulai dari tahun 2009 sampai 2013 dengan jumlah sebanyak 25 data.

### 4. Pembahasan

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan hasil penelitian berkaitan dengan Analisis Penerbitan Surat Tagihan Pajak (X) dan Penerimaan Pajak (Y). Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Bandung diantaranya KPP Pratama Bandung Tegalega, KPP Pratama Bandung Cibeunying, KPP Pratama Bandung Karees, KPP Pratama Bandung Bojonagara, dan KPP Pratama Bandung Cicadas. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan penerimaan pajak tahunan periode 2009-2013. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

### Hasil Analisis Deskriptif

Analisis Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penerimaan Pajak pada lima KPP Pratama Kota Bandung tersebut selama periode 2009 – 2013. Berikut disajikan gambaran mengenai surat tagihan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung selama periode 2009-2013:

**Tabel 4.**

### Surat Tagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung Periode 2009-2013

Kantor Pajak	Surat Tagihan Pajak (dalam %)				
	2009	2010	2011	2012	2013
KPP Pratama Bandung Tegallga	89,91	-4,97	-12,01	80,00	19,82
KPP Pratama Bandung Cibeunying	155,17	88,74	-17,98	150,05	-4,00

Kantor Pajak	Surat Tagihan Pajak (dalam %)				
	2009	2010	2011	2012	2013
KPP Pratama Bandung Karees	95,02	-5,99	-1,99	11,19	28,38
KPP Pratama Bandung Bojonagara	32,34	4,98	53,88	18,21	-9,95
KPP Pratama Bandung Cicadas	52,78	-13,33	66,08	26,95	1,00
<b>Rata-rata</b>	<b>85,04</b>	<b>13,88</b>	<b>17,60</b>	<b>57,28</b>	<b>7,05</b>

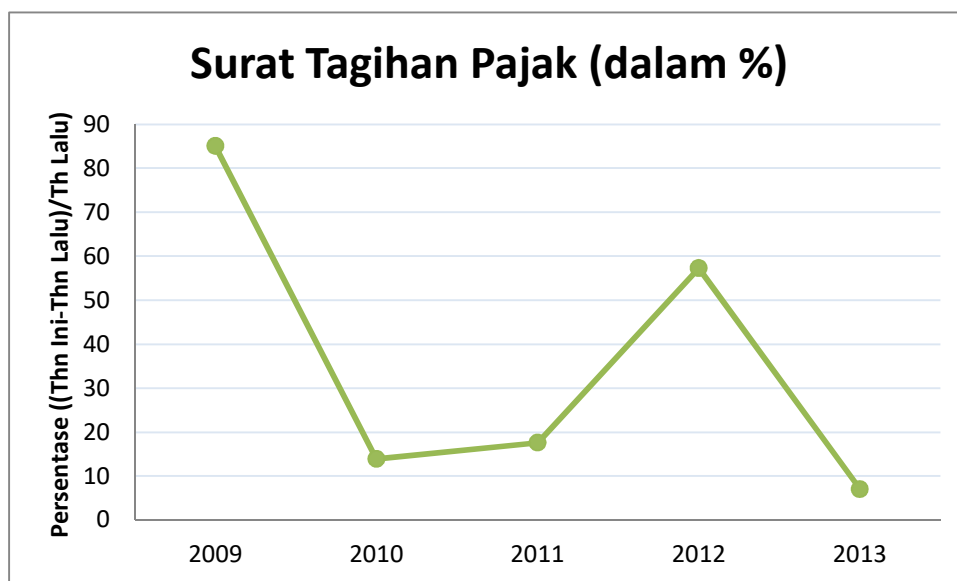
(Sumber : KPP Pratama kota Bandung, data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa:

1. Tahun 2009 merupakan tahun pertama yang digunakan dalam penelitian. Pada tahun ini terlihat penerbitan surat tagihan pajak sebesar 85,04 %. Penerbitan surat tagihan pajak terjadi karena terlambatnya pelaporan SPT, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/ atau salah hitung.
2. Pada tahun 2010 penerbitan surat tagihan pajak yaitu sebesar 13,88 atau menurun sebesar 71,16% dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini KPP Pratama kota Bandung mengalami penurunan tingkat penerbitan surat tagihan pajak. Penurunan terjadi dikarenakan wajib pajak yang melaporkan SPT nya sudah mulai sesuai dengan seharusnya dan tepat waktu sehingga tidak perlu diterbitkan surat tagihan pajak.
3. Pada tahun 2011 penerbitan surat tagihan pajak yaitu sebesar 17,56 atau meningkat sebesar 3,72% dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, KPP Pratama kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena masih ada wajib pajak yang terkena sanksi bunga/administrasi yang dikarenakan pelaporannya yang sudah jatuh tempo dan pengisian yang salah tulis dan/atau salah hitung.
4. Pada tahun 2012 penerbitan surat tagihan pajak yaitu sebesar 57,28 atau meningkat sebesar 39,68% dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pada tahun ini terjadi peningkatan penerbitan STP pada KPP Pratama kota Bandung. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang lalai membayar pajak pada tempat waktu dan kurangnya pemahaman dalam menggunakan sistem perpajakan yang mengakibatkan banyaknya kesalahan dalam pelaporan SPT.
5. Pada tahun 2013 rata-rata penerbitan surat tagihan pajak yaitu sebesar 7,05 atau menurun sebesar 50,23% dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, KPP Pratama kota Bandung mengalami penurunan penerbitan STP. Hal tersebut disebabkan oleh semakin beratnya sanksi pajak yang dikenakan apabila wajib pajak masih belum memenuhi kewajiban membayar pajak.

Adapun untuk mengetahui perkembangan rata-rata penerbitan surat tagihan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung periode 2009-2013, dapat dilihat pada gambar grafik berikut:





Gambar 1.

**Grafik Surat Tagihan Pajak Pada KPP Pratama Kota Bandung periode 2009-2013**

Gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan surat tagihan pajak pada KPP Pratama yang Kota Bandung. Dari gambar tersebut diketahui bahwa surat tagihan pajak terendah berada pada tahun 2013 sebesar 7,05% sedangkan Surat Tagihan Pajak tertinggi berada pada tahun 2009 sebesar 85,04% dengan rata-rata Surat Tagihan Pajak pada KPP Pratama Kota Bandung pada periode 2009 – 2013 sebesar 36,17%. Sedangkan jika dilihat dari perkembangannya seperti yang terlihat pada gambar di atas terjadi fluktuatif, dimana secara umum terjadi penurunan sejak periode awal tahun 2009 hingga tahun 2013. Peningkatan STP yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2012, namun kembali menurun pada tahun 2013.

**Analisis rasio penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung Periode 2009-2013**

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran rata-rata penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung periode 2009-2013.

Tabel 5

**Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung periode 2009-2013**

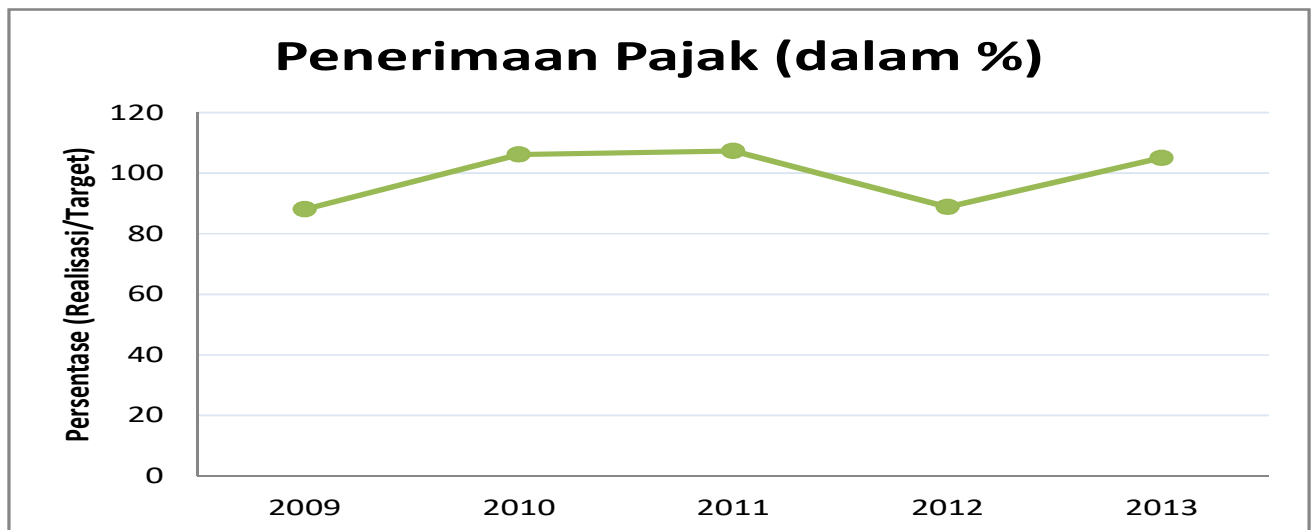
Kantor Pajak	Penerimaan Pajak (dalam %)				
	2009	2010	2011	2012	2013
KPP Pratama Bandung Tegallga	80,03	122,50	108,79	81,22	99,21
KPP Pratama Bandung Cibeunying	92,10	104,41	107,65	74,98	112,46
KPP Pratama Bandung Karees	83,19	127,72	122,32	94,38	107,50
KPP Pratama Bandung Bojonagara	90,88	87,28	93,76	106,04	109,29
KPP Pratama Bandung Cicadas	94,26	88,98	104,06	87,70	96,74
<b>Rata-rata</b>	<b>88,09</b>	<b>106,18</b>	<b>107,32</b>	<b>88,86</b>	<b>105,04</b>

(Sumber : KPP Pratama Bandung, data diolah)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa:

1. Tahun 2009 merupakan tahun pertama dijadikan penelitian, pada tahun ini terlihat penerimaan pajak pada KPP Pratama kota Bandung sebesar 88,09%. Laporan penerimaan pajak tahun 2009 merupakan dasar dilakukannya penelitian. Sehingga peneliti belum dapat memperbandingkan.
2. Pada tahun 2010 penerimaan pajak yaitu sebesar 106,18 atau meningkat 18,09% dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, KPP Pratama kota Bandung mengalami kenaikan tingkat penerimaan pajak bahkan melebihi target 100%. Hal tersebut karena tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama kota Bandung mengalami peningkatan.
3. Pada tahun 2011 rata-rata penerimaan pajak yaitu sebesar 107,32 atau meningkat 1,14% dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, KPP Pratama kota Bandung mengalami peningkatan kembali dan target dapat dicapai melebihi 100% kembali. Hal tersebut karena upaya sosialisai yang dilakukan KPP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak .
4. Pada tahun 2012 penerimaan pajak yaitu sebesar 88,86 atau menurun sebesar 18,46% dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, KPP Pratama kota Bandung mengalami penurunan karena meningkatnya penerbitan surat tagihan pajak, sehingga penerimaan pajak tidak mencapai target.
5. Pada tahun 2013 penerimaan pajak yaitu sebesar 105,04 atau meningkat sebesar 16,18% dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, KPP Pratama kota Bandung mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya bahkan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan menurunnya penerbitan surat tagihan pajak.

Adapun untuk mengetahui perkembangan rata-rata penerimaan pajak pada KPP Pratama kota Bandung selama periode 2009-2013, dapat dilihat pada gambar grafik berikut :



Gambar 2.

Grafik Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Bandung  
periode 2009-2013

Pada gambar grafik di atas, dapat dilihat bahwa:

Perkembangan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kota Bandung. Dari gambar tersebut diketahui bahwa penerimaan pajak terendah berada pada tahun 2009 sebesar 88,09% sementara penerimaan tertinggi terjadi tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 107,32% dengan rata-rata penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Bandung pada periode 2009 – 2013 sebesar 99,10%. Sedangkan jika dilihat dari perkembangannya seperti yang terlihat pada gambar di atas terjadi fluktuatif, dimana terjadi peningkatan penerimaan pada tahun 2010, 2011, dan tahun 2013, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2012.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penerbitan surat tagihan pajak berfluktuatif dimana titik terendah ada di tahun 2009 dan tertinggi terjadi pada tahun 2011. Penyebab terjadinya titik tertinggi penerbitan SPT di tahun 2009 adalah karena terlambatnya pelaporan SPT serta kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/ atau salah hitung. Adapun terjadinya penurunan di tahun 2013 hingga mencapai titik terendah karena semakin beratnya sanksi pajak yang dikenakan apabila wajib pajak masih belum memenuhi kewajiban membayar pajak.

Seperti halnya penerbitan SPT, penerimaan pajak pun mengalami naik turun. Berdasarkan hasil penelitian titik terendah penerimaan pajak terjadi di tahun 2009, tahun ini dijadikan tahun dasar dalam penelitian ini sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun titik tertinggi dalam penerimaan pajak terjadi di tahun 2011. Hal ini dikarenakan

### Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan terkait rasio penerbitan surat tagihan pajak dan rasio penerimaan pajak, maka penulis akan memberikan saran yaitu:

1. Untuk menekan penerbitan Surat Tagihan Pajak agar penerimaan pajak dapat diterima secara optimal, pihak KPP Pratama Bandung dapat melakukan tindakan seperti sosialisasi mengenai pengetahuan dalam membayar pajak dan berkomunikasi dengan baik agar wajib pajak tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran.
2. Bagi pengembangan ilmu terkait rasio penerbitan surat tagihan pajak dan rasio penerimaan pajak penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi khususnya perpajakan.
3. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam hal yang sama, disarankan untuk menambah indikator ataupun variabel lain sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi.

### Referensi

- Agusti, Asri Fika dan Vinola Herawaty. *“Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama”*, Simposium Nasional Akuntansi 12, Palembang, 2009.
- Awat, Napa I dan Mulyadi. 1995. *Keputusan-Keputusan Keuangan Perusahaan: Teori dan Hasil Pengujian Empirik*. Yogyakarta:Liberty
- Bradley, Cassie Francies. 1994. *An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior*. Dissertation. The University of Alabama, USA.
- Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Early Suandy. 2002. *Hukum Pajak*. Penerbit Salemba, Jakarta.

- Ginting Riskon. 2006 pengaruh Pemberian Surat penagihan terhadap pembayaran tunggakan pajak penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak. Jurnal ekonomi dan bisnis. Volume 5 no 1
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B. 2010. *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hutagaol, Jhon. 2008. *Perpajakan: isu-isu kontemporer*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Jonathan, Sawarno, 2012. *Statistik Itu Mudah*. Penerbit Cv Andi Offset, Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan RI. "Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 235/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak", Kementerian Keuangan RI, Jakarta, 2003.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Yogyakarta : Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. Denpasar: Bali
- Siti Kurnia Rahayu. "*Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*". Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta. 2010.
- Siti Resmi. "*Perpajakan: Teori dan Kasus*", Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Rochmat Soemitro. 2004. *asas dan dasar perpajakan 1 dan 2*. Redika aditama. Bandung.
- Santoso, S. 2002. *Latihan SPSS : Statistik Parametrik*. Penerbit PT. Elexmedia Komputindo.Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke-15 Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sumadi Suryabrata.2013. *Metodologi Penelitian*.Cetakan ke 24.PT.RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- "Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", Pemerintah RI, Jakarta, 2000. \_\_\_\_\_,"
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007". Pemerintah RI, Jakarta, 2007
- Vegirawati, Titin. 2011. "*Hubungan Antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang*". VOL. 1 NO. 3 September 2011 Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)

Waluyo, 2004. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. “*Perpajakan Indonesia*”, Salemba Empat. Jakarta, 2004.

Widi Widodo. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*, CV Alfabeta, Bandung.

Wiko Saputra. 2014. *Realisasi Pajak 2014 Capai Rekor Terendah*. melalui  
<http://www.radarjakarta.com/berita-2970-realisasi-pajak-2014-capai-rekor-terendah.html>

[www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com) : Fuad Rahmany, Yustinus, Data Kemenkeu

[http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1\\_suryadi.pdf](http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1_suryadi.pdf)

[www.djapk.depkeu.go.id](http://www.djapk.depkeu.go.id)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) : Hasan

[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) : Kismantoro Petrus

<http://warungmassahar.blogspot.com>

[www.vivanews.com](http://www.vivanews.com) : Bambang P.S Brodjonegoro,